

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG BELA NEGARA

Muhammad Azhar*)

Hubungan antara Islam dengan masalah bela negara masih jarang dibahas. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, masih dominan pandangan yang dikotomis tentang hubungan Islam dengan aspek bela negara, baik di kalangan Islam maupun di luar Islam. Kedua, kurangnya kesadaran historis terutama di kalangan intern umat Islam bahwa Islam sebenarnya sangat berkepentingan dengan istilah bela negara dimaksud. Ketiga, masih rancunya formulasi Islam (secara konseptual teoritis maupun operasional praktis) tentang bela negara terutama di kalangan para tokoh atau pemimpin Islam. Dalam hal ini timbul persoalan apakah konsepsi Islam tentang bela negara, bagaimana bentuknya, adakah fakta historis yang mendasarinya, samakah substansi pemikiran yang terkandung dalam istilah-istilah berikut ini: "bela negara", "membela tanah air", "mencintai tanah air", "stabilitas negara", "loyalitas terhadap bangsa dan negara", serta istilah-istilah yang senada lainnya. Keempat, masih dominannya common sense di sementara kalangan umat yang cenderung "anti" terhadap negara, atau berkaitan dengan asumsi yang menyatakan bahwa dalam beberapa babakan sejarah kenegaraan (kebangsaan), sebaliknya, negara pun cenderung "anti" kepada agama (Islam).

Untuk menjernihkan berbagai persoalan di atas, penulis merasa terpenggil untuk menulis tulisan ini dengan harapan kiranya permasalahan hubungan antara Islam dengan negara khususnya dalam lingkup kenegaraan (nasional) kita menjadi lebih nyata,

hal ini tidak berarti adanya klaim bahwa tulisan ini akan menjawab semua persoalan yang ada secara tuntas. Tetapi paling tidak, penulis secara tulus dan berupaya seobyektif mungkin meluruskan persepsi-persepsi yang keliru tentang hal-hal terse-

*) Drs. Muhammad Azhar, M.A., Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

but di atas. Untuk itu, koreksi positif dan konstruktif tetap penulis harapkan demi kesempurnaan dan tercapainya tujuan dari penulisan tulisan ini.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, tulisan ini tentunya menjadi sangat penting, mengingat mayoritas bangsa ini adalah umat Islam. Konsekuensi logisnya adalah maju-mundurnya bangsa dan negara ini, secara moral, sangat tergantung kepada adanya partisipasi aktif, positif dan konstruktif dari umat Islam itu sendiri tanpa mengabaikan komunitas umat lain tentunya. Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh dalam upaya pelestarian perangkat kenegaraan yang ada terutama di bidang bela negara dan dalam rangka kesinambungan bangsa dan negara Indonesia di masa depan, maka upaya penyadaran secara ideologis-politis lebih-lebih tentang hubungan Islam dengan bela negara merupakan suatu hal yang sangat penting.

Pengertian Istilah Bela negara

Adapun yang dimaksud dengan istilah "Bela negara" di sini

ialah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Berkaitan dengan bela negara tersebut, maka upaya bela negara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara². Adapun hakikat pertahanan negara adalah merupakan perlawanan rakyat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggungjawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan dan kekuatan sendiri, baik penyerahan diri maupun penyerahan

¹ Naskah Departemen tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982, Pusat Kesejahteraan Artileri Tentara Nasional Angkatan Darat Pusat Pendidikan ND: 11.03, 1089, h. 3.4.

² *Ibid.* h. 4.

wilayah³.

Adapun tujuan dari pertahanan keamanan negara adalah untuk menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional.⁴

Dari pengertian bela negara di atas kita dapat mengambil beberapa poin penting yaitu pertama, adanya unsur keterpaduan dari segenap potensi bangsa untuk secara bersama mempertahankan eksistensi negara. Kedua, adanya unsur kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara sebagai perekat kehidupan bangsa. Ketiga, bahwa setiap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri pada hakikatnya akan merugikan dan berdampak pada perpecahan bangsa yang justru akan merugikan warga negara itu sendiri. Keempat, bela negara adalah sebagai media pertahanan keamanan negara yang mana hal tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Kelima, upaya tersebut merupakan tanggungjawab warga secara mandiri (keyakinan akan kekuatan sendiri).

Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian istilah bela negara tersebut tampaknya ada kesamaan antara bela negara, membela negara, mencintai tanah air, stabilitas negara, loyalitas terhadap bangsa dan negara. Bila ingin diuraikan, maka istilah bela negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dari istilah-istilah lainnya, seperti membela tanah air (bersifat geografis), mencintai tanah air (bersifat psikologis), stabilitas negara (bersifat *security*), loyalitas terhadap bangsa dan negara (bersifat dedikatif).

Pengertian Islam tentang Bela Negara

Bila dikaitkan dengan ajaran Islam, jelas sekali bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian istilah bela negara di atas. Misalnya nilai-nilai solidaritas (*ta'awun*), kesetiaan terhadap ideologi negara yang telah disepakati bersama (*kalimatun sawa'*), rasa persatuan dan persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) secara Islami, menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan (*amar ma'ruf nahi munkar*), keharusan menunaikan hak dan kewajiban, percaya atas ke-

³ *Ibid*, h. 4

⁴ *Log cit*.

yakinan diri sendiri secara positif dan konstruktif, serta nilai-nilai lainnya.

Berkaitan pula dengan nilai-nilai di atas, ada satu hal yang menjadi catatan kita, khususnya yang menyangkut dengan istilah "ukuwah Islamiyah". Ternyata, pemahaman umat Islam terhadap istilah "ukhuwah Islamiyah" selama ini cenderung dipahami secara sempit, eksklusif dan sektarian. Seolah-olah pengertian tentang ukhuwah Islamiyah tersebut hanya terbatas di kalangan intern umat Islam belaka. Tentunya, pemahaman seperti itu akan berdampak kepada munculnya sikap (tanpa disadari) "antipati" kepada saudaranya yang non-muslim, dan sebaliknya tetap bersimpati atau lebih berpihak kepada saudara sesama muslim, walaupun saudaranya itu telah berlaku salah. Boleh jadi, disebabkan adanya fenomena di atas, menyebabkan almarhum KH Ahmad Shidiq (mantan sesepuh NU) menelorkan konsep (pengertian) baru di samping "ukhuwah Islamiyah", yang menurut beliau bermanfaat untuk kontribusi kebangsaan, yakni dikenal dengan istilah "ukhuwah Wathoniyyah" (persaudaraan sebangsa).

Penulis sendiri beranggapan bahwa konsep tersebut masih ada unsur dikotomisnya. Penafsiran yang lebih relevan harus dipahami atau diartikan secara inklusif, universal dan kosmopolit, yakni persaudaraan secara Islami. Bahkan, bila kita lihat pengertian (*meaning*) dari "Islamiyah" itu sendiri adalah persaudaraan dalam bentuk penuh "kepasrahan" dan "kedamaian". Karena kata-kata Islam mengandung makna yang sangat dalam, yakni keselamatan, kepasrahan, kedamaian maupun kesejahteraan⁵.

Sangat disayangkan, karena adanya proses historis-sosiologis, pemaknaan terhadap "Islam" tersebut menjadi lebih eksklusif dan sektarian. Dan itu merupakan produk masa lalu sejarah Islam terutama pada abad pertengahan. Padahal bila dilihat sejarah Islam pada masa awal yakni masa Nabi Muhammad SAW, jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara muslim dan non-muslim, terlebih-lebih dalam bela negara. Di zaman Nabi siapa saja yang berkhianat - lebih-lebih terhadap negara - akan dikenakan sanksi, baik ia dari golongan muslim atau bukan.⁶

⁵ Nurchollish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992, h. 426-446.

⁶ N. Shiddiqi, *Piagam Madinah*, Menteri Masa, Yogyakarta, 1989, h. 39, 40, 17-18.

Untuk itulah pengertian persaudaraan yang berwatak sosiologis itu harus kita kembalikan kepada pemahaman yang lebih filosofis. Bukankah Islam merupakan sistem nilai yang tidak hanya diturunkan Allah untuk orang Islam, tetapi juga semesta alam,⁷ termasuk alam tumbuh-tumbuhan, hewan serta makhluk Tuhan lainnya. Alangkah damainya dunia ini bila pemahaman seperti di atas dapat disosialisasikan dan dapat diadopsi oleh segenap anggota masyarakat, terlepas apa pun bentuk latar belakang kehidupannya, baik secara politis, ekonomis, kultur maupun agama.

Pada tulisan berikut ini akan penulis kemukakan beberapa argumentasi terhadap beberapa pernyataan di atas, baik yang bersifat normatif (Al-Qur'an dan Hadits) maupun operatif (fakta historis umat Islam, terutama sekali pada masa awal), sampai kepada kenyataan empirik kesejarahan umat Islam di belahan dunia Islam termasuk Indonesia tanpa mengabaikan aspek negatif dari perkembangan kesejarahan yang ada. Kelak akan terlihat nyata, bahwa secara normatif, Islam sangat apresiatif dan inheren dengan konsep bela negara. Walaupun tak dapat dipungkiri dalam realitas empiriknya

punya gambaran positif maupun negatif tentang hubungan antara keduanya (Islam dan bela negara). Untuk itu setiap proses sejarah harus dikaji secara kritis terutama oleh calon generasi bangsa di masa depan. Karena, manusia yang buta akan sejarah pasti akan kehilangan perspektif. Selanjutnya, orang yang kehilangan perspektif akan berakibat kehilangan identitas kediriannya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan diri serta kebingungan dalam menentukan sikap hidup di alam yang fana ini.

Beberapa Dalil Normatif tentang Bela Negara

Bila kita mau mengkaji Al-Qur'an, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang erat kaitannya dengan bela negara, walaupun pada umumnya diungkapkan secara implisit, hal tersebut karena begitu universalnya Al-Qur'an, agar ia tetap relevan dengan segala perubahan zaman. Sedangkan dalil-dalil normatif yang ada dalam berbagai hadits Nabi tentu lebih eksplisit (empirik), mengingat hadits pada umumnya menyangkut dengan realitas kehidupan Nabi dan para sahabatnya.

7 QS Al Anbiya': 107

Pada uraian berikut penulis hanya mengutip beberapa dalil yang kita anggap relevan, di antaranya sebagai berikut.

"Dan saling solidaritaslah kamu tentang kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling solidaritas tentang dosa dan permusuhan" (Al-Maidah:2)⁸

"...marilah kepada suatu kalimat ketepatan-persamaan (*common platform*) yang tidak ada per selisihan di antara kami dan kamu..." (Ali Imran: 64)⁹

"Wahai sekalian umat manusia. Sesungguhnya Kami ciptakan kamu sekalian dari pria dan wanita, dan Kami jadikan kamu sekalian beragam bangsa dan suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulai di antara kamu di sisi Allah ialah kamu yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Teliti". (Al-Hujarat: 14)¹⁰

"Jadilah kamu sebaik-baik umat, yang ditampilkan ke tengah-tengah umat manusia, kamu menyuruh manusia berbuat yang ma'ruf serta mencegah mereka dari perbuatan yang munkar,

dan kamu (tetap) beriman kepada Allah..." (Ali-Imran: 110)¹¹.

"Jika kamu membela ajaran Allah, Allah pun pasti akan membela kamu dan mengokohkan posisimu..." (Muhammad:7)¹².

Ayat-ayat di atas secara implisit sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam istilah bela negara dimaksud, yakni nilai-nilai, solidaritas, dan sebagainya.

Sedangkan ayat berikut ini secara eksplisit berkaitan dengan bela negara dimaksud.

"Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah melarang kalian memperlakukan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan barangsiapa memperlakukan mereka sebagai kawan maka mereka itu adalah orang-orang zalim". (Al-

⁸ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pelita II, 1978-1979, Jakarta, h. 156-157.

⁹ *Ibid*, h. 86

¹⁰ *Ibid*, h. 847

¹¹ *Ibid*, h. 94

¹² *Ibid*, h. 831

Mumtahanah: 8-9).¹³

Dari penuturan ayat di atas dapat kita pahami bahwa kita disuruh berbuat adil dan baik terhadap siapa saja kecuali terhadap orang yang memerangi dan mengusir kita dari negeri yang kita diami. Kita tidak dibenarkan berteman dengan musuh, lebih-lebih musuh negara. Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya sikap bela negara terutama terhadap musuh yang ingin menggerogoti kedaulatan negara.

Ayat lain menyatakan:

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong” (An Nashr: 1-2)¹⁴.

Ayat di atas diturunkan Allah setelah Nabi Muhammad beserta pengikutnya berhasil kembali menaklukkan (mempertahankan) kota kelahirannya (Mekkah al Mukarramah) dari penguasaan kaum jahiliyah (orang-orang Arab yang zalim). Dalam sejarah kita ketahui bahwa walaupun kota Mekkah berhasil kembali direbut oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi tetap memaafkan penduduk Mekkah yang insyaf (istilah sekarang: Nabi meng-

adakan amnesti secara massal), hal tersebut menunjukkan keluhuran hati Beliau sebagai panglima dan pemimpin umat di masa itu. Ketika Nabi di perantauan (di Madinah Al Munawwarah) Beliau selalu merindukan ingin kembali ke tanah kelahirannya yang telah dikuasai oleh para penjahat Quraisy.

Di sisi lain, ekspresi dari sikap pembelaan terhadap negara juga diwujudkan dalam sikap menjaga diri dan mawas diri dari setiap upaya penyebaran fitnah (*issue*) yang negatif. Mengingat *issue* tersebut dapat mengganggu stabilitas masyarakat (negara). Al-Qur’an dengan tegas menyatakan:

“Dan fitnah (*issue*) itu lebih kejam (berbahaya) dari pembunuhan”. (Al Baqarah: 191).¹⁵

“Dan fitnah (*issue*) itu lebih besar (dosanya) dari pembunuhan”. (Al-Baqarah: 217)¹⁶.

Selanjutnya, di dalam Al-Qur’an, menurut kamus Fathurrahman, terdapat 19 ayat yang mengandung istilah “Bilad” (Negara),¹⁷ dan beberapa di antaranya berkaitan erat dengan “pembelaan” terhadap “negara” (Bilad) tersebut. Misalnya:

“Apakah kamu tidak memper-

¹³ *Ibid*, h. 924

¹⁴ *Ibid*, h. 114

¹⁵ *Ibid*, h. 46

¹⁶ *Ibid*, h. 52

¹⁷ Lihat Faidlullah al Husny al Muqaddasy, *Fathu ar Rahman Li thaalibi aayati al Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt, h. 59-60.

hatikan bagaimana Tuhan-mu berbuat terhadap kaum 'AAD? (Yaitu) penduduk IRAM yang mempunyai bangunan-bangunan (arsitektur) yang tinggi. Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain. Dan kaum Fir'aun mempunyai pengikut yang banyak. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhan-mu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhan-mu benar-benar mengawasi". (Al-Fajr: 6-14).¹⁸

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa bangsa yang tidak memperhatikan aspek stabilitas (lahir dan batin) dalam negerinya akan mengakibatkan hancurnya negara tersebut, bagaimanapun megah dan indahnya bangunan yang ada di dalamnya. Aspek keonaran dan destabilitas bangsa akan berakibat kepada kehancuran sebuah negara.

Penjelasan di atas ada kesamaan pada ayat berikut ini. "Seungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kepada mereka dikatakan: "Makanlah olehmu dari rezeki yang (di-

anugerahkan) Tuhan-mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhan-mu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl (sejenis pohon cemara) dan sedikit dari pohon Sidr (sejenis pohon bidara). Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan tidak kami azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat ingkar (jahat)". (Saba': 15-18).¹⁹

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an lainnya, ada beberapa anjuran terhadap suatu bangsa untuk senantiasa menjaga stabilitas negara yang ia diami, baik secara fisik maupun non-fisik, moral atau material. Bila hal tersebut dapat terwujud, Allah akan memberikan karunia-Nya yang berlipat ganda. Ayat Al-Qur'an menyatakan: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-

¹⁸ Lihat Depag RI, *Ibid*, h. 1057-1058

¹⁹ *Ibid*, hl. 685-686

ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (Al-A'raf: 96).²⁰

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Al-A'raf: 56).²¹

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Al-Baqarah: 126).²²

Demikianlah beberapa ayat Al-Qur'an, yang sebenarnya masih banyak lagi bila kita hendak mengutipnya. Tetapi untuk memenuhi tujuan penulisan ini, hal tersebut di atas sudah sangat memadai.

Berikut ini coba kita mengutip beberapa dalil normatif selain Al-Qur'an, yakni dari beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang ada relevansinya dengan

bela negara.

"Bila kamu melihat kemungkar-an (destabilitas), atasilah (ubahlah) dengan tangan (kekuasaan)-mu, bila kamu tidak mampu, atasi dengan lidah (bicara). Bila tidak mampu juga atasilah dengan hati (rasa tidak senang terhadap kejahatan), namun itu selemah-lemah iman" (Al Hadits).

"Barangsiapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapat ganjaran seperti kebaikan yang dilakukan orang yang telah ia tunjuki" (Al Hadits)

"Andaikata Fatimah (anak Nabi) mencuri pasti akan saya potong kedua tangannya". (Al Hadits)

"Perbuatan yang sangat sederhana tapi sangat mulia adalah membuang duri (rintangan) dari jalan raya". (Al Hadits)

Dari berbagai hadits populer di atas tergambar bahwa betapa pentingnya usaha menjauhkan masyarakat dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkar-an dan betapa mulianya upaya memasyarakatkan nilai-nilai yang positif dan konstruktif bagi pembangunan masyarakat yang secara keseluruhan akan membawa implikasi positif bagi terjaminnya stabilitas bangsa dan negara.

²⁰ *Ibid*, h. 237

²¹ *Ibid*, h. 237

²² *Ibid*, h. 237

Fakta Historis Islam tentang Bela negara dan Kemiliteran

Sejak alam terbentang, ketika Allah bermaksud menjadikan seorang khalifah (mandataris) di muka bumi, para Malaikat mengajukan argumen bahwa bila manusia yang dijadikan mandataris Tuhan kelak mereka akan membuat onar dan kerusakan di alam ini. Lebih baik, menurut mereka (para Malaikat), Malaikat saja yang dijadikan khalifah. Alasannya, para Malaikat senantiasa bertasbih dan memuja Tuhan. Namun Allah mengajukan argumen lain, di samping karena kemahatahuan Tuhan, ternyata Malaikat mengalami ketidakmampuan untuk mengungguli Adam (manusia), khususnya dalam penguasaan nama-nama benda alam, dalam artian, Malaikat kurang memahami simbol-simbol alam yang justru akan dipimpin (dikelola) kelak setelah dinobatkan menjadi khalifah²³. Logikanya, syarat mutlak seorang khalifah atau mandataris haruslah terlebih dahulu menguasai simbol-simbol yang akan dikelola (dipimpinnya). Seorang pendidik yang baik haruslah menguasai simbol (ilmu) pendidikan, seorang calon pimpinan militer yang baik haruslah menguasai terlebih dahu-

lu simbol-simbol (ilmu) kemiliteran, begitu juga bidang-bidang lainnya.

Dengan demikian, Malaikat tidak pantas menjadi khalifah di alam ini, karena ia tidak menguasai simbol-simbol yang ada di dalamnya. Manusia (Adam) lebih pantas, karena ia menguasai simbol-simbol tersebut.

Ternyata, setelah Adam dilantik menjadi khalifah bersama istrinya Siti Hawa, muncul tokoh pengacau stabilitas yakni makhluk yang bernama Iblis, sebagai simbol destabilisator di alam ini. Stabilitas syurga yang dihuni Adam dan Hawa menjadi labil dengan kehadiran Iblis. Allah pun murka menghukum Adam, karena ia terpengaruh dengan godaan Iblis, untuk keluar dari syurga lalu turun ke bumi, walaupun akhirnya Adam bertaubat atas kekhilafannya sebagai manusia. Sedangkan Iblis tetap konsekuen dengan simbol destabilisatornya, sampai kiamat kelak. Itu sekedar ilustrasi historis tentang kekacauan yang ada di alam ini beserta para pelakunya. Ternyata sejak awal Allah telah membenci ketidakstabilan di alam ini. Alam ini harus dibela dari tangan-tangan dan kekuatan yang negatif dan destruktif yang kelak akan merugikan alam beserta penghuninya itu sendiri.

²³ *Ibid*, h. 13-15

Pembelaan terhadap alam sebagai "negara terbesar" yang mewadahi "negeri-negeri kecil" merupakan simbol betapa pentingnya aspek pembelaan tersebut. Demikianlah, proses sejarah terus berlanjut yang secara substansial memiliki kesamaan historis, perbedaan yang ada hanya terletak pada pelaku, tempat dan ruang waktu yang melingkupinya. Sejarah mencatat pula, betapa para Nabi dan Rasul pasca Adam, yakni sejak Nabi Idris sampai Isa as tetap berada dalam dua kutub yang saling bertentangan dengan musuh atau seterunya. Nabi dan Rasul ditokohkan sebagai simbol stabilisator, sedang seterunya sebagai tokoh destabilisator. berbahagialah umat manusia yang mau meniru ketokohan Nabi dan Rasul tersebut, dan betapa ruginya bagi yang mengikuti para seteru mereka.

Di masa Nabi Muhammad SAW sendiri, aspek pembelaan terhadap negara merupakan salah satu aspek perjuangan beliau yang maha penting di samping tauhid. Justru untuk mempertahankan program tauhid yang telah beliau rencanakan itulah diperlukan adanya stabilitas komunitas sosial dengan segala dimensinya, yakni dimensi ideologis (*common platform*), intelektual (pemikiran, moral (etika), sosial, budaya dan hankam (mi-

liter). Bila tauhid merupakan aspek stabilitas non-fisik yang bersifat vertikal terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ketaqwaan), maka selain tauhid berarti mencakup dimensi sosial (*muamalah*) dalam pengertian horizontal seperti tersebut di atas.

Atau dalam bahasa lain, stabilitas ketuhanan dan kemanusiaan (sebagaimana yang tercantum dengan indah dalam kerangka falsafah negara kita Pancasila) adalah ibarat dua sisi mata uang yang antara satu dengan lainnya tak mungkin dipisahkan. Untuk menjaga ketuhanan kedua hal tersebut Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah secara non-fisik, seperti dakwah, pengajaran, ibadah dan sejenisnya, tetapi sejarah pun mencatat bahwa Rasulullah juga mementingkan aspek fisik (militar). Rasulullah sendiri semasa hidupnya aktif berperang untuk membela tanah airnya dan negara yang dipimpin, tujuan beliau tidak lain adalah membela agama, keluarga, pengikut dan tanah airnya dari ancaman fisik baik dari dalam maupun dari luar oleh para penjahat kaum kafir dan musyrik ketika itu. Tujuan akhir dari program beliau tersebut adalah untuk menciptakan tata dunia baru menggantikan tata dunia lama yang berwatak jahiliyah.

Sejarah juga mencatat, beta-

pa Rasulullah itu memimpin langsung peperangan di garda terdepan, bahkan sampai pernah patah kaki, beliau juga pernah terperangkap ke dalam lubang yang dalam, walaupun akhirnya beliau dapat diselamatkan oleh para sahabatnya yang setia²⁴. Sejarahwan memberikan ilustrasi tentang ketokohan Rasul, bahwa Rasul adalah orang yang selalu menangis di malam hari, ketika beribadah menghadap Tuhan-nya, tetapi ada siang harinya Rasul tampik bagaikan seorang panglima perang yang gagah perkasa. Rasulullah tidak hanya seorang muslim yang mahir berpidato, mengajar dan berdakwah. Ternyata beliau juga seorang pedagang (*business man*) dan panglima perang sekaligus. Beliau sangat ahli menyusun strategi perang dan perjuangan. Keberhasilan beliau meloloskan diri dari kepungan para jawara Quraisy ketika akan hijrah ke Madinah adalah hasil taktik dan strategi beliau. Beliau menugaskan Ali untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya, agar orang yang mengepungnya menyangka bahwa Muhammad memang masih tidur dalam kamarnya. Beliau mengajak Abu Bakar, se-

orang diplomat tua yang ulung untuk sama-sama hijrah, mengingat Abu Bakar adalah orang yang kaya pengalaman dan sedikit tenang, tidak seperti Umar yang cepat terpancing emosinya bila melihat ketidakbenaran. Rasul juga menugaskan seorang mata-mata untuk mengamati siasat musuh yang berusaha untuk membunuhnya, juga menugaskan seorang petugas pembawa makanan (perbekalan) selama beliau hijrah antara jazirah Mekkah dan Madinah yang cukup luas bila dilihat keadaan masa itu yang belum memiliki sistem transportasi yang akurat.²⁵

Walaupun demikian, dalam upaya mempertahankan negerinya dari serangan musuh, Rasul tetap bersikap demokratis dengan para sahabatnya. Beliau juga tidak segan-segan ketika mengangkat seorang panglima muda bernama Usamah untuk memimpin sebuah peperangan, yang ketika itu banyak dikritik oleh para sahabatnya yang lebih senior dari Usamah. Namun Rasul menjelaskan kebijaksananya tersebut, saat itu ia melihat Usamah sedang bersemangat untuk membalas kematian orang tuanya yang dibunuh oleh kaum

²⁴ Untuk dapat lebih mendalami bagaimana sepak terjang Rasul dalam medan peperangan, dapat dilihat: Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, juga karya, Ibn Hisyam, *Shirah Muhammad*, terjemahan, Mizan, Bandung, 1990 seta banyak buku-buku lainnya.

²⁵ *Ibid.*

kafir, dan saat itu memang sedang dibutuhkan pula seorang panglima yang tidak ragu-ragu dalam bertindak. Usamalah orang yang dianggap tepat oleh Nabi, walaupun usianya masih muda tetapi ia termasuk tangkas di medan perang.

Berkaitan dengan peran Nabi di atas, timbul pertanyaan mengapa Rasulullah sangat aktif melibatkan diri dalam upaya membela tanah airnya, padahal ia seorang Rasul dan Nabi. Hal tersebut tak lain karena Islam merupakan agama yang berwatak kemasyarakatan, yang sudah tentu sangat membutuhkan sarana-sarana kemasyarakatan pula yang dapat mendukung lebih terealisasinya serta terjaminnya pelaksanaan nilai-nilai Islam itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Islam walaupun dalam bentuk ritualnya, sangat membutuhkan adanya pranata sosial. Misalnya, bila umat Islam mau melaksanakan shalat tentunya butuh air untuk wudhu', tikar sembahyang, masjid dan lain-lain. Apalagi menyangkut masalah sosial seperti pendidikan, pertahanan negara, dan lain-lain.

Tidak heran, bila upaya mempertahankan nilai-nilai keutuhan,

kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial, Islam sangat membutuhkan sarana kenegaraan dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tapi perlu ditegaskan di sini, bahwa Islam tidak mesti harus mendirikan apa yang disebut dengan "Negara Islam" (*Islamicate* atau *Islamic-State*) seperti: Iran, Pakistan dan lain-lain. Yang penting bahwa Islam dapat menerima bentuk negara apa pun (semisal negara Pancasila, sebagai bentuk final negara RI), sepanjang dapat memberi peluang bagi terealisasinya nilai-nilai Islami sebagaimana yang telah disepakati dalam sistem kenegaraan kita. Sekali lagi perlu ditegaskan, yang diinginkan adalah negara yang Islami bukan negara Islam. Yang dimaksud dengan negara yang Islami di sini adalah sautu negara yang mau dan mampu menegakkan nilai-nilai Islami seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan dan sebagainya secara persuasif dan edukatif²⁶.

Kembali pada permasalahan bela negara di atas, bahwa Nabi Muhammad dalam sejarah kehidupannya pernah mendapat serangan operasi militer dari negara kota (*city state*) setelah Nabi

²⁶ Untuk diskursus yang luas tentang hal ini dapat dibaca buku: H. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990. Juga karya Ahmad Syafi'i Maarif: *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985. Juga buku-buku lainnya.

memberikan Yathrib, lebih kurang 400 km di barat laut Mekah) dalam masa sepuluh tahun pertama hidupnya. Dengan demikian Muhammad beserta pengikutnya pun terpaksa mempersiapkan diri secara militer pula untuk mempertahankan (defensif) dari serangan kaum Quraisy Mekah ketika itu.

Berdasarkan fakta historis yang ada, pasca Nabi, tentara Islam kelak memperluas operasi militernya bahkan sampai ke Cordova (Spanyol). Yang perlu kita ketahui bahwa, sistem militer di masa Nabi tersebut masih sangat sederhana sesuai dengan kultur budaya yang ada. Satuan-satuan tempurnya belum dikenal oleh sebuah markas besar seperti yang ada sekarang ini dalam dunia militer kita. Masing-masing dipimpin oleh seorang komandan (*amir*) yang langsung bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan. Perbekalan perang pun masih dibawa oleh masing-masing pasukan. Jadi belum ada pasukan khusus di bidang perbekalan (konsumsi) atau logistik. Di masa Nabi juga belum ada sistem penggajian atau imbalan material yang permanen dan administratif. Baru di masa khalifah Umar tentara agak lebih profesional. Di masa Nabi imbalan material itu hanya diperoleh dari hasil rampasan perang (*ghanimah, booties*), yang diram-

pas dari tangan musuh. Perintah atau komando perang belum dikeluarkan oleh lini komando yang berjenjang, melainkan hasil seruan untuk melakukan perang suci (*jihad*) yang dikumandangkan di masjid-masjid. Tentara waktu itu masih sangat sederhana penampilannya.

Di masa Nabi, konfirmasi militer melawan tentara Quraisy Mekah berjalan selama lebih kurang delapan tahun dan berakhir pada pengepungan (*siege*) selama beberapa bulan atas kota Madinah (tempat Nabi berdiam) oleh pasukan gabungan suku-suku Arabia non-muslim, operasi ini dikenal dengan nama Perang-Parit (*Ghazwah al-Khandaq*), pada tahun 627 M. Perlu dijelaskan di sini bahwa istilah Ghazwah digunakan untuk pertempuran dalam skala besar, sedangkan dalam skala kecil digunakan istilah *waqi'ah* (*battle*).

Pengaturan bala tentara Muslim untuk mempertahankan kota melalui penggalian parit untuk menghalangi lawan, melahirkan pembagian kerja yang lebih jelas di kalangan tentara Muslim ketika itu. Dibentuk pasukan gerak cepat melakukan serangan kilat sewaktu-waktu atas titik terlemah dalam barisan musuh yang melingkari kota. Pembentukan pasukan yang tidak melakukan serangan frontal atas induk kekuatan musuh, melainkan me-

lakukan serangan mendadak atas titik terlemah pihak musuh di lambung bala tentara musuh itu, ternyata segera menjadi pola ketentaraan pihak Muslim, seperti terlihat dalam operasi militer pertama yang bersifat eksternal ke luar jazirah Arabia. Pada tahun 629 pasukan muslim yang berjumlah tiga ribu orang menyerang bala tentara Byzantium yang dipimpin sendiri oleh Heraclius, terdiri dari minimal tiga puluh ribu tentara, di Mut'ah (daerah Jordania sekarang).

Induk tentara Muslim yang melakukan serbuan frontal langsung ke induk pasukan musuh tidak berhasil mencapai kemenangan, bahkan menderita kerugian jiwa yang cukup banyak, termasuk gugurnya muda Abdullah bin Rawalah. Tetapi kegagalan ini membawakan sebuah pengalaman sangat berharga bagi tentara muslim, yaitu munculnya kebutuhan akan strategi peperangan yang jelas, di samping kesadaran akan pentingnya pasukan gerak cepat yang mampu menerobos langsung kekuatan musuh. Khalid bin Walid yang menggantikan kedua komandan yang gugur itu hanya mampu menolong tentaranya dari jepitan yang mematikan dari bala tentara Byzantium dengan jalan serbuan cepat

ke lambung kekuatan musuh untuk membuka jalan lari. Perang Mut'ah ini menandai sebuah periode baru berupa munculnya sekelompok militer profesional di lingkungan masyarakat muslim²⁷.

Di masa pemerintahan khaliifah Umar Ibn Khattab (pasca Nabi) aspek bela negara dengan sistem militernya mulai dikendalikan secara lebih profesional. Bila di masa Nabi tentara belum mendapatkan imbalan penggajian yang permanen, maka di masa Umar ada langkah baru tentang sistem penggajian tersebut. Adapun sumber dana untuk penggajian tersebut diambil dari dana *baitul-mal* (semacam Bank Islam atau Bank Syari'ah yang ada sekarang ini). Di masa Umar pun mulai dibentuknya sistem hirarki kepemimpinan militer, hal tersebut tidak lain karena adanya tuntutan bagi upaya perluasan ekspansi Islam ke luar jazirah Arabia. Sistem hirarki tersebut ditandai dengan adanya sistem komando terpusat di bawah pimpinan seorang panglima tertinggi angkatan perang. Di bawahnya lagi ada pimpinan perang bala tentara (*amir al jais*) yang membawahi pula pasukan-pasukan yang memiliki kesamaan keanggotaan berdasarkan suku (*qabilah*). Sedangkan kepala

²⁷ Lihat Abdurrahman Wahid, "Islam dan Militarisme dalam Lintasan Sejarah", *Prisma*, Jakarta, 12 Desember 1980, hl. 65-66.

pemerintahan (*khalifah*) (presiden: istilah sekarang) juga sebagai panglima tertinggi bala tentara muslim (*amir al-mu'minin*). Dengan tanggung jawab penuh kepada panglima tertinggi angkatan perang itu, walaupun markas besar itu dapat didirikan hanya di luar ibukota, di kala melakukan operasi militer.

Khalid bin Wahid kemudian dibebastugaskan oleh panglima tertingginya, Khalifah Umar bin Khattab, secara formal karena penyalahgunaan fasilitas bala tentara, sebagaimana disebutkan dalam kronikel sejarah Islam dari sumber dini. Tetapi besar kemungkinan tindakan itu dilakukan untuk memelihara supremasi ibukota negara atas hirarki markas besar di medan pertempuran yang terletak beribu-ribu kilometer di dataran rendah Irak (*Ard al Sawad*). Dengan cara demikian, supremasi pemerintahan sipil atas bala tentara dipelihara terus menerus selama operasi penaklukan yang memakan waktu belasan tahun dan mencapai Asia Tengah di sebelah Timur dan Afrika Utara di sebelah Barat. Hubungan antara Islam dan profesi militer pada waktu itu jelas menunjukkan pola dukungan pihak militer kepada aspirasi keagamaan dari pihak non-militer, dan belum ada pemerintahan militeristis di lingkungan masyarakat muslim

waktu itu.

Belakangan kaum militer mulai menjalankan fungsi pemerintahan akibat dari adanya perubahan struktur pemerintahan Islam itu sendiri. Sistem khalifah yang dipilih menjadi khalifah turun-temurun (dinasti) yakni di tangan dinasti Umayyah, pemerintahan Islam menjadi berubah ke arah sistem monarki yang banyak bersandar lebih banyak lagi pada kelompok militer profesional. Walaupun secara formal raja yang bergelar khalifah tetap berfungsi sebagai panglima tertinggi bala tentara (*amir al-Mukminin*), dalam kenyataan (praktek) kekuasaan itu banyak didelegasikan kepada pejabat-pejabat militer di wilayah imperium yang begitu luas. Mulai saat itu muncul kelas militer baru yang menjadi penguasa daerah, bertindak sekaligus sebagai pejabat berfungsi pemerintahan sipil maupun panglima pasukan yang ditempatkan di suatu daerah. Tokoh-tokoh militer seperti al-Hajjaj ibn Yusuf, Yazid ibn Abih, Muhallab ibn Abi Sufrah dan Qutaibah ibn Muslim muncul sebagai gubernur militer Irak, Mesir, Jazirah Arabia, Afrika Utara (sebelah Barat Mesir) dan Khurasan (meliputi wilayah Iran dan Afghanistan sekarang). Kenyataan munculnya tokoh-tokoh militer itu sebagai gubernur (wali) dalam sejarah Islam yang

baru berusia tujuh puluhan tahun itu disebabkan oleh perlawanan militer dari kelompok-kelompok muslim yang tidak puas dengan pemerintahan pusat yang ada, yang berkedudukan di Damaskus.

Perlawanan itu muncul dari perpecahan politik yang sangat tajam antara berbagai suku bangsa Arab, perpecahan mana paling sulit diatasi terjadi antara kedua suku bangsa terbesar Mudar dan Rabi'ah. Melalui pola pembentukan bala tentara muslim sewaktu memulai penaklukan ke luar jazirah Arab, di wilayah-wilayah yang diduduki didirikan perkampungan militer (*garrisons*) yang kemudian berkembang menjadi deretan kota-kota. Yang terkenal di antaranya ialah Basrah dan Kufah, yang juga merupakan pangkalan bagi penyerbuan lebih jauh. Kota-kota militer itu dengan segera merupakan rangkaian kumpulan pasukan-pasukan terpusat, yang terdiri dari kekuatan yang terbagi tidak hanya menurut pembagian ketentaraan (kavaleri, infantri, logistik dan seterusnya), melainkan juga berdasarkan pembagian suku. Dengan cepat kota-kota tersebut menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintah pusat, hal mana memaksa pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai kepala pemerintahan propinsi-propinsi

yang masing-masing meliputi kawasan puluhan ribu kilometer persegi. Pengangkatan al Hajjaj ibn Yusuf sebagai gubernur Irak, misalnya, terjadi setelah ia berhasil menegakkan jasa dengan reputasi sebagai *jagal* sewaktu memadamkan pemberontakan Abdullah ibn al Zubair di jazirah Arab (ia bahkan tidak segan-segan memerintahkan perusakan Ka'bah dan pembakaran masjidil Haram) secara efisien. Tindakan drastis diambilnya untuk tujuan pasifikasi yang dibebankan ke atas pundaknya; pemerintahan teror untuk jangka waktu enam tahun, penghancuran kelas pemuka masyarakat dari suku-suku Arab secara total (dengan jalan memberikan status berimbang kepada kelompok non Arab) di kedua kota Basrah dan Kufah, dan pemusatan pasukan-pasukan Syria di ibukota propinsi Irak yang baru, Wasit (dekat bekas ibukota imperium Babylonia jauh di masa sebelum penaklukan oleh tentara muslim).

Pemerintahan dinasti Umayyah yang berjalan selama delapan puluh tahun (dari permulaan diajukannya claim sebagai Khalifah oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun 661, hingga kelahiran Yazid II di tangan pendiri dinasti Abbsyah, Abu al Abbas al Saffah, pada tahun 750), ternyata tidak dapat diper-

tahankan oleh pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai gubernur di berbagai kawasan imperiumnya yang luas. Dinasti Abbasyah yang meneruskan kebijaksanaan seperti itu bahkan lebih buruk lagi nasibnya²⁸.

Dalam sejarah kemiliteran Islam pasca Nabi, ternyata mengandung aspek positif sekaligus sisi negatifnya. Di masa Abu Bakar (khalifah I), ternyata militer dimanfaatkan untuk menumpas kaum murtad (keluar dari agama Islam). Salah satu penyebab kemurtadan tersebut, ditinjau dari segi antropologi bangsa Arab, saat itu Nabi Muhammad SAW tidak hanya dipandang sebagai Nabi dan Rasul belaka, tetapi lebih dari itu, ia dipandang sebagai kepala suku-suku Arab. Dengan wafatnya Rasul Muhammad SAW, sebagian bangsa Arab (terutama yang lemah iman) menganggap bahwa tidak ada lagi kewajiban untuk mengikuti perintahnya sebagaimana pada saat Nabi masih hidup. Melihat fenomena yang mengancam kelestarian agama dan negara, Abu Bakar menggunakan kekuatan militer untuk menumpas mereka. Sikap Abu Bakar ini ditentang oleh beberapa sahabat senior terutama oleh Umar bin Khattab. Umar berpendapat bahwa kaum murtad

tidak boleh dibunuh, selagi mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun mereka tidak lagi mengerjakan shalat, puasa, zakat dan amal Islam lainnya. Dalam hal ini, Umar lebih memahami kemurtadan secara tekstual (*leterlijk*). Sedangkan Abu Bakar berpendapat, bahwa mereka telah dianggap murtad, karena tidak lagi membuktikan ucapan syahadatnya, yakni dengan jalan meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti tersebut di atas, walaupun secara lisan mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi pada hakikatnya mereka tidak bersyahadah lagi. Dalam hal ini Abu Bakar memahami makna syahadah secara kontekstual. Yang jelas sejarah mencatat betapa kekuatan militer Islam yang berada di bawah komando Abu Bakar mencoba mengatasi fenomena kemurtadan tersebut.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab (khalifah II), kaum militer telah dikelola secara lebih profesional, dengan sistem penggajian, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Sedangkan di masa Usman bin Affan (khalifah III), kekuatan militer tidak begitu menampakkan aktivitasnya. Bahkan akibat mulai pecahnya kekuatan umat Islam menjadi

²⁸ *Ibid*, h. 67-68.

beberapa kelompok di antaranya Syi'ah dan Khawarij, mengakibatkan pecahnya pula kekuatan militer Islam, yang waktu itu ada yang berpihak pada Usman, sementara yang lainnya berpihak kepada Ali (Syi'ah), dan ada pula yang bersifat netral (khawarij). Di masa Usman pulalah mulai tampilnya kekuatan militer banu Umayyah, yang pada saat kepemimpinan Usman yang kosong dari sahabat pilihan, mulai diisi oleh kelompok banu Umayyah yang ambisius. Sejak lama memang terjadi persaingan dalam memperebutkan gelar "amir al Mukminin" antara Banu Umayyah dan Banu Hasyim. Kelemahan Usman di bidang pemerataan pembangunan kelak dimanfaatkan oleh kelompok militer Umayyah (yang mampu memakmurkan rakyatnya pada saat Mu'awiyah menjabat sebagai gubernur di Syam), ditambah lagi munculnya gejala nepotisme di masa Usman, semakin memperlebar peluang masuknya tokoh-tokoh Umayyah.

Kelak di masa Umayyah terjadi "fitnah al Kubra" yang membawa kepada kematian Usman. Setelah Usman wafat, umat Islam pecah menjadi tiga golongan besar, yakni golongan pertama, Abdullah bin Mas'ud dan 'Ammar

ibn Yasir. Mereka ini dikenal sebagai kelompok yang zuhud (menjauhi kehidupan dunia terutama politik). Kelompok kedua berada di bawah pimpinan Aisyiah, Talhah, Zubair yang cenderung pro Usman, mereka inilah yang sangat keras menuntut kematian Usman. Sedangkan kelompok ketiga diwakili oleh Mu'awiyah yang kelas banyak melakukan ekspansi Islam ke luar jazirah Arabia. Di masa khalifah Ali (IV), peranan militer (di pihak Ali) mengalami kekalahan politis ketika diadakannya perdamaian diplomatis antara kelompok Ali dengan Mu'awiyah. Utusan Mu'awiyah yang bernama Amir bin Ash bertindak secara licik yang akhirnya mengguguli utusan Ali, Abu Musa Asy'ari yang tua dan polos dalam berdiplomasi. Di masa Ali, muncul kelompok lain umat Islam yakni golongan murji'ah dan kaum Sunni. Saat itu Mu'awiyah memulai karir militernya yang di samping memiliki lembaran hitam juga memiliki sisi positifnya, yakni semakin meluasnya perkembangan Islam ke luar jazirah Arab. Kelak Mu'awiyah dikenal sebagai arsitek kerajaan (monarki) Muslim²⁹.

Mengingat betapa besarnya peran Mu'awiyah dalam bidang kemiliteran Islam, ada baiknya

²⁹ Untuk diskursus ini dapat dilihat dalam karya M.Noor Matdawam, *Lintasan Sejarah Kebudayaan Islam*, CV Bina Usaha, Yogyakarta, 1989. Nouruzaman Shiddiqie, *Pengantar Sejarah Muslim*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1983, Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I-II, Jakarta 1971, dan lain-lain

bila kita ketengahkan serba ringkas kiprah beliau dalam sejarah Islam. Umayyah adalah putra Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Kemunculan Mu'awiyah dalam pelataran politik Islam periode klasik sangat menggembirakan kelompok bani Umayyah yang selama ini lebih didominasi oleh kelompok Banu Hasyim. Keunggulan Banu Hasyim tidak lain karena kekayaan dan pengaruh mereka yang luas di kalangan suku-suku bangsa Arab. Sedangkan Banu Umayyah termasuk golongan yang "terlambat" memeluk agama Islam, namun dua tokoh Umayyah yakni Abu Sofyan dan Mu'awiyah diberi kehormatan oleh Nabi sebagai penulis Al-Qur'an. Berkat kebijaksanaan Nabi tersebut, prestasi Banu Umayyah menjadi naik. Di masa khalifah Abu Bakar, Yazid ibn Abi Sofyan diangkat menjadi panglima di negeri Syam, juga sampai masa Umar Mu'awiyah menjadi gubernur di Yordania. Sebelumnya, Abu Sofyan (ayah dari Yazid dan Mu'awiyah) telah wanti-wanti kepada kedua putranya tersebut, agar kelak dapat menguasai kepemimpinan amir al-mukminun. Secara faktual, kehadiran Banu Umayyah dalam panggung perpolitikan Islam lebih berwatak ambisius ketimbang religius. Dan ambisi Banu Umayyah semakin terbuka lebar pada masa kekhalifah-

an Usman bin Affan. Religiositas Usman dimanfaatkan oleh ambisi Banu Umayyah. Mu'awiyah, adalah tokoh diplomat yang licik dan garang, memiliki prinsip "konflik - harmoni", integrasi plus disintegrasi, jadi memiliki semacam *"split-personality"*. Kelak hubungan Banu Umayyah dan Banu Hasyim putus setelah datangnya Islam. Bila Banu Hasyim sebagai pendukung Nabi maka Banu Umayyah dikenal sebagai penentang Nabi. Adapun issue-issue "menuntut darah Usman" pada masa Ali sebagai khalifah, hanyalah sekedar manuver politik Mu'awiyah. Kenyataannya, setelah beliau menjabat sebagai khalifah (setelah Ali) issue tersebut tak pernah dijadikan landasan programnya. Sebenarnya issue tersebut dilontarkan hanya untuk menjatuhkan kepemimpinannya Ali, agar dengan mudah dapat diambil alih olehnya.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, para penentang Mu'awiyah dihadapi dengan dua cara: kekerasan atau diberi jabatan. Mu'awiyah sangat mahir memancing konflik untuk ambisi politiknya. Ada beberapa faktor kesuksesan Mu'awiyah di antaranya adalah kemampuan merekrut para tokoh, memanfaatkan situasi konflik, memiliki kekayaan, ketegasan, kondisi yang mendukung dan juga faktor keturunan. Karis ke-

khalifahan Mu'awiyah diraih lewat "pedang", bukan lewat upaya "demokrasi" (secara langsung atau perwakilan). Kepemimpinannya ibarat seorang "raja", hal ini tercermin dari pernyataannya sendiri "*ana awwal al mulk*" (saya adalah raja pertama). Tampaknya, kepemimpinan beliau lebih dipengaruhi oleh tradisi kerajaan Parsi. Dalam kaitan ini, Abdul A'la al Maududi (pemikir asal Pakistan) menyatakan bahwa indikasi perubahan sistem kekhalifahan ke sistem kerajaan ditandai dengan perubahan aturan pengangkatan khalifah, hilangnya kebebasan peradilan, berdirinya pemerintahan tanpa musyawarah, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat, munculnya *ta'ashub* (sistem kesukuan). Mu'awiyah juga merancang "kebulatan tekad" di daerah-daerah demi kelangsungan dinasti Umayyah³⁰.

Terlepas dari kekurangan Mu'awiyah tersebut, beliau berhasil membangun imperium Umayyah selama lebih kurang 80 tahun (41-132 H atau 661-750 M). Pada masa khalifah Abd. Malik, bahasa Arab resmi di Timur Tengah termasuk wilayah jajahan Romawi. Dinasti Umayyah juga berjasa memperluas wilayah kekuasaan, pembangunan masjid, rumah sakit ser-

ta lembaga sosial lainnya. Ada tiga wilayah besar operasi Umayyah, yakni di wilayah Barat mencakup Asia Kecil, Konstantinopel dan Laut Tengah, juga Afrika Utara, Atlantik dan Spanyol. Sedangkan di wilayah Timur, mencakup sungai Juhun (Abu Dariah), Sind dan India. Ada 3 faktor pendorong ekspansi Umayyah tersebut, yakni pertama, adanya ancaman bangsa lain seperti Parsi dan Romawi. Kedua, konsep Jihad (perang melawan musuh). Ketiga, ambisi untuk menguasai³¹.

Ekspansi Islam termasuk militernya berlangsung sejak tahun 650 - 1000 M. Pada abad 10 - 13 Islam mengalami kemunduran. Kemurnian Islam menjadi teroda oleh perpecahan dan bentuk keterbelakangan lainnya. Dunia Islam mengalami perang saudara serta krisis kepemimpinan. belakangan dunia militer Islam terlibat dalam perang Salib yang dikomandokan oleh kaum gerejawan Eropa. Pada akhir abad 12, Jengis Khan (Barbar) menjarah dunia Islam di belahan Barat (Baghdad). Sedangkan Timur Lenk di belahan timur (Spanyol) pada abad 15, ditandai dengan bergelimpangan 700 ribu tengkorak manusia (umumnya umat Islam). Pada periode berikutnya, militer Islam

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

dipimpin oleh Turki Usmani yang juga menghadapi bangsa Barbar (Mongol). Pada akhir abad 15 Renaissance muncul di Eropa, sejak itu dunia Islam mulai digempur oleh Barat (abad 18 - 19), juga akibat revolusi industri Eropa.

Di awal abad 20 muncul gerakan Wahabi, kekuatan militer digunakan untuk menumpas kaum syirik dan khurafat terutama di jazirah Arabia. Gerakan tersebut dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan mendapat dukungan dari raja Saud. belakangan M. Ali (gubernur Mesir) dengan bantuan militer Eropa dapat mengalahkan militer Wahabi dan Saud. Di bawah bayang-bayang pemikiran Wahabi muncul Pan Islamisme di India, Aljazair dan Bahai (Parsi). Kelak Pan Islamisme tidak hanya bergerak di bidang pemikiran tapi juga banyak mempengaruhi gaya militer muslim. Akibat dominasi Barat, gerakan (militer) muslim menjadi lebih radikal. Walaupun ada juga kelompok umat Islam yang semata-mata bergerak di bidang tarikat dan dakwah. Di Turki Sultan A. Hamid adalah seorang Pan Islamis tapi bersikap otoriter, akibatnya muncul Turki Muda dan di masa itu muncul perang Balkan. Pada tahun 1904 terjadi perang antara Rusia - Jepang. Sun Yat Sen (Cina) mendukung

Islam, karena Cina pernah merasa dibantu oleh Islam, ketika itu terjadi kolaborasi militer Islam dengan Hindu dan Jepang dalam menghadapi Rusia. Setelah itu muncul perjanjian Versailles yang pada hekatikanya hanya perjanjian "kosmetik" untuk mengkapling dunia Islam oleh Barat. Karena politik "kapling" tersebut, muncul persaingan internal di kalangan militer Eropa dan menandai kebangkitan militer Islam, terlebih-lebih lagi ketika Turki (simbol kekuatan militer Islam) dikapling oleh Barat. Kubu intern Islam menjadi bersatu, ekonomi (dagang dan industri), Pan Islamisme bangkit kembali. Pengaruh Barat mulai memasuki dunia Islam terutama di bidang industri dan transportasi modern khususnya di kalangan atas dan menengah India dan Turki. Mulai timbul gap antara tradisi lokal dengan peradaban Barat. Eropanisme memasuki dunia Islam lewat dominasi politik dan ekonomi baik secara tindak kekerasan (militer) maupun secara damai (lewat ekonomi).

Pada akhir abad 19, banyak negeri-negeri Islam yang mengalami kemerdekaan dari penjajahan Barat. Namun dunia Timur pada umumnya belum siap berkonstitusi. Perjuangan hanya bersifat agitatif. Sejak itu muncul konsep nasionalisme di dunia Is-

lam terutama di Timur Dekat dan Timur Tengah. Turki pertama sekali mengenal nasionalisme. Karena adanya perbedaan kultural antara Arab dan Turki, terjadi kontak militer antara kedua bangsa tersebut. Mustafa Kemal di Turki lewat kekuatan militernya pertama sekali menjalankan politik sekularisasi.

Dari sudut pandangan militer, kebangkitan dunai Timur (Islam) dalam menghadapi Barat disebabkan beberapa hal, yakni Islam merupakan agama yang sangat progresif, kurang fahamnya Barat terhadap Islam, bersatunya kaum liberal dan radikal Islam dalam menghadapi dominasi Barat baik di bidang politik, ekonomi dan militer, Barat cenderung menganggap rendah dunia Timur (Islam), Barat ingin mengeksploitisir kekayaan Timur, kontak Timur dengan Barat melahirkan kecerdasan bagi Timur, modernisasi Barat melahirkan transformasi bagi Timur, masuknya nasionalisme Barat ke Timur, penindasan Barat terhadap Timur secara keras (militer) maupun damai (ekonomi)³².

Demikian beberapa uraian hubungan Islam dengan dunia militer yang tentunya erat dengan istilah bela negara sebagaimana yang menjadi tema sen-

tral tulisan ini. Berikut ini kita coba sedikit menguraikan hubungan Islam dengan militer di Indonesia.

Dalam sejarah Islam di Indonesia, ternyata tercatat pula hubungan yang erat antara Islam dengan militer. Sejarah banyak mencatat bahwa sebelum masa kemerdekaan umat Islam banyak menampilkan aspek kemiliteran dalam upaya memerdekakan negara Indonesia dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Tampilnya Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Teuku Umar, Tgk. Cik Ditiro, Tuanku Imam Bonjol, juga para ulama-ulama Islam serta para santri pesantren di berbagai pelosok tanah air menggambarkan hubungan tersebut. Demikian pula pada masa kemerdekaan, siapa yang tidak mengenal Panglima Jenderal Soedirman, Bung Tomo dengan gema takbirnya yang menggugah arek-arek Suroboyo serta pahlawan lainnya. Demikian pula peran Hizbullah (laskar bangsa yang didominasi oleh umat Islam) kelak menjadi cikal-bakal tentara rakyat bahkan akhirnya menjadi cikal-bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ternyata peran umat Islam yang banyak dipelopori oleh

³² Penjelasan lebih rinci tentang hal ini dapat dibaca dalam L. Stoddart, *Dunia Islam*, (Terjemahan) Tinta Mas, Jakarta.

ulama dan tokoh-tokoh Islam menunjukkan betapa sejarah kemiliteran di tanah air juga banyak didukung oleh aspek terjang umat Islam di negeri ini.³³

Di samping bela negara secara fisik (milter) maka secara non fisik (semisal lewat jalur pendidikan, dakwah dan sosial) umat Islam Indonesia turut mencerdaskan bangsa dan memelopori upaya kemerdekaan tanah air lewat berbagai pergerakan Islam maupun yang bersifat nasional, secara pribadi besarnya kontribusi umat Islam di negeri ini. Tujuannya tak lain adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk umat Islam *an-sich*. Hal ini sesuai dengan prinsip agama Islam sebagai pembawa rahmat bagi semua makhluk di alam ini. Kalaupun ada goresan sejarah umat Islam yang negatif, hal tersebut bukanlah bagian dari ajaran Islam, tetapi merupakan sebuah proses sejarah yang sedang menuju ke gerbang kesempurnaannya. Kesalahpahaman antara umat Islam dengan aspek kebangsaan memang pernah terjadi di negeri ini, hal tersebut karena belum begitu akrabnya hubungan antara wawasan keis-

laman dengan kebangsaan di kalangan umat Islam yang masih banyak di bidang ilmu pengetahuan maupun bidang keagamaan. Namun suatu hal yang patut disyukuri, akhir-akhir ini kesenjangan antara kedua wawasan tersebut semakin dapat diatasi, tak lain adalah karena semakin meningkatnya rata-rata pendidikan umat, juga semakin meratanya kemakmuran dan stabilitas politik negeri tercinta ini. Insya Allah pada tahapan jangka panjang mendatang, akan lebih baik lagi.³⁴

Belakangan, dengan lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), berlangsungnya Festival Istiqlal, munculnya Bank Muamalat Indonesia, semakin kuatnya desakan arus informasi negara di masa mendatang. Tugas kita adalah bagaimana menjaga dan mengawal proses transisi dan transformasi sosial saat ini agar tetap sesuai dengan cita-cita sosial politik yang stabil dan lebih demokratis lagi di masa yang akan datang.

Keterkaitan Erat antara Islam dengan Negara

Berdasarkan dalil-dalil normatif dan fakta historis di atas

³³ Sebagai bahan telaah dapat dibaca karya HA. Mukti Ali, *Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia dan Modern Islamic Thought in Indonesia*, Yayasan NIDA, Yogyakarta, cet. II, 1969. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. III, LP3ES, Jakarta, 1985. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980.

³⁴ *Ibid.*

jelaslah bahwa Islam sangat berkaitan erat dengan asas bela negara tersebut dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*. Oleh sebab itu kuranglah tepat bila hubungan Islam dengan bela negara menjadi dikotomis bila dikaitkan dengan perilaku segolongan kecil umat Islam yang radikal, ekstrim, militan dan sempalan, sebagaimana yang terdapat dalam semua penganut agama. Bangsa Indonesia wajib bersyukur, karena di samping Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa juga karena Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini³⁵. Umumnya, negara-negara yang mayoritas muslim, keadaannya lebih stabil ketimbang negara yang muslimnya minoritas. Kita bisa belajar dari India, Myanmar, Irlandia, Palestina, Philipina, Thailand, Bosnia, dan lain-lain. Kebanyakan umat Islam menjadi tertindas pada saat berada pada pihak minoritas, baik minoritas secara kuantitatif maupun minoritas dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan lain-lain. Sebaliknya negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, negeri

tersebut lebih stabil seperti negara tercinta Indonesia. Hal tersebut tidak lain karena ajaran Islam sangat mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa persatuan, toleransi, kedamaian, kesejahteraan, tenggang rasa, solidaritas, dan lain-lain. Islam sangat anti terhadap segala macam bentuk penindasan baik sesama manusia maupun makhluk lain. Walaupun ada ancaman destabilisasi semuanya itu tak lain karena pengaruh dari arogansi kekuasaan belaka, baik di tangan seseorang maupun sekelompok orang.

Menyangkut perilaku ekstrim dan radikal tersebut di atas, seharusnya tidak semata-mata dilihat dari akibat pemahaman keagamaan yang sempit belaka, namun lebih dari itu perlu dilihat dari sudut aspek politik represif, ekonomi yang belum merata (masih banyak kesenjangan), gap sosial dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, agama Islam selalu dijadikan alat legitimasi bagi sebuah fenomena ketidakadilan, yang kadangkala dan memang kebanyakan semata-mata erat kaitannya dengan aspek non-agama. Munculnya fundamentalis keagamaan mes-tilah dilihat sebagai bentuk legi-

³⁵ Nurcholish Madjid, "Islamic Da'wah in Indonesia; The Challenge of The Post-Colonialism and of The Social Change in A Plural Society", 23-26 September 1992, *An International Seminar on Religions and Contemporary Development (in Comparative Perspective)*, Yogyakarta, Indonesia, p. 9.

timasi ketimbang motivasi.

Di sisi lain, ada pula *trend* bahwa Islam cenderung anti negara, sedangkan di sisi lain negara bersifat anti pada Islam. Kedua fenomena yang kontradiktif ini tidaklah bisa dilihat secara sepintas dan dengan kamata tinjauan yang bersifat sederhana. Kedua fenomena tersebut erat kaitannya dengan sebuah proses historis yang sangat panjang. Telah dikemukakan pada penjelasan terdahulu bahwa Islam pada hakikatnya baik secara normatif maupun fakta historis lainnya sangatlah berkepentingan dengan aspek bela negara dimaksud yakni dalam rangka mengembangkan kehidupan kemanusiaan yang positif dan konstruktif, dan sebaliknya untuk menafikan pola kehidupan kemanusiaan yang negatif dan destruktif. Adapun munculnya sikap anti pada negara, dan dalam saat yang sama membawa kepada implikasi logis kepada antinya negara terhadap agama, secara historis bermula (dalam konteks negara-agama) dari pola kehidupan sekularisme pada zaman Eropa.

Sebelum kita sampai pada sekularisme tersebut, ada baiknya bila kita telusuri latar belakang munculnya gejala sekularisme tersebut. Ada 3 corak pemikiran yang pernah muncul sebelum lahirnya sekularisme di-

maksud. Pertama, corak pemikiran Yunani Kuno-Romawi (dari mitos ke filsafat). Kedua, corak pemikiran abad pertengahan (teologi-agama). Ketiga, corak pemikiran zaman modern (induktif-sains).

Pada masa corak pemikiran Yunani Kuno-Romawi (sekitar abad 6 SM-6M), pola pemikiran umat manusia yang banyak dikuasai oleh mitos-mitos mitologi, myte, tahyul, dongeng-dongeng. Sekitar abad 3 SM-6M, pola mitologi tersebut mulai mengarah kepada pemikiran yang lebih maju (rasional) yakni pola filosofis (filsafat). Athena (Yunani) sebagai pusat perdagangan yang ramai, di mana masyarakat mulai mempertanyakan tentang keteraturan alam, sampai tentang siapa pencipta alam. Pertanyaan itu dulu dijawab bahwa yang menciptakan alam adalah para dewa (faham theogoni dan kosmogoni) belakangan dijawab secara filosofis seperti munculnya Thales, Anaximander, Anaximanes, Pythagoras, Herakletos, Demokritos dan lain-lain. Sampai pada munculnya Socrates, Plato dan Aristoteles. belakangan lahir filsafat logika, etika dan estetika.

Pada era kedua (abad Tengah) sekitar abad 6-15 M muncul para tokoh agama (baca: Kristiani) yang cenderung anti filsafat, walaupun ada juga yang

bersifat apresiatif terhadap filsafat seperti Agustinus (354-430), Thomas Von Aquino (1225-1274). Sejak abad inilah wajah filsafat yang dulunya berwajah mitologi beralih ke teologi. Pada era teologi ini keberadaan gereja menjadi *super state* (negara di atas negara). Kehidupan masyarakat terlalu dikekang oleh negara yang secara ekonomis-politis waktu itu didominasi oleh para feodalis (bangsawan) dan kaum agamawan (gerejawan) yang banyak menguasai tanah.

Pada era ketiga (zaman modern) abad 15-19 M muncul era *renaissance* (kebangkitan ilmu) maupun *aufklarung* (*enlightment*: pencerahan budi). Pada era ini manusia-manusia bebas lahir kembali (*rebirth, resnascimanto, regeneration*) setelah sekian lama ditindak oleh gereja-gereja orthodox. Yang dimaksud bebas di sini adalah dalam pengertian tidak lagi punya komitmen dengan otoritas apa pun seperti tradisi, gereja (agama), raja, norma-norma sosial dan sebagainya. Individualisme (otoritas pribadi) menjadi menonjol dengan semboyan *leberation* (pembebasan, kemerdekaan), *emansipation* (persamaan) maupun otonomi (hak mengatur diri sendiri tanpa do-

minasi dari luar).

Pada era ketiga ini pola pemikiran filsafat Yunani diterjemahkan ke alam empirik sehingga melahirkan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Dengan kata lain pola pemikiran deduktif berakhir ke induktif. Pada saat inilah munculnya beberapa fenomena, pertama, sekularisasi (gereja hanya mengurus agama saja, sedangkan dunia harus bebas dari pengaruh agama, diurus oleh kaisar - penguasa negara). Inilah awal munculnya pertentangan agama dan negara, yang kelak melahirkan dua kecenderungan. Di satu sisi gereja (agama) anti negara, di sisi lain negara menjadi anti terhadap agama. Kedua, agama ditinggalkan oleh filsafat masing-masing berjalan sendiri, juga selanjutnya filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang (spesialis).³⁶

Yang relevan dengan tulisan ini adalah munculnya fenomena sekularisasi (pemisahan agama dengan negara - dunia) sebagaimana tercermin pada penjelasan di atas. Kaum gerejawan (agamawan) dianggap kolot dan tidak mengerti persoalan dunia beserta segala macam problema yang ada di dalamnya. Saat itulah muncul istilah fundamental-

³⁶ Penjelasan lebih rinci dapat dilihat: Louis O. Kattsof, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986. Ir. Poedjawijatna, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, PT pembangunan, Jakarta, 1980. Dan lain-lain.

isme keagamaan maupun radikalisme keagamaan³⁷. Belakangan oleh proses historis-sosiologis dan kesalahpahaman Barat dalam melihat hakikat ajaran Islam (yang cenderung menyamakan Islam dengan Kristen), istilah fundamentalisme keagamaan pun memasuki dunia Islam³⁸. Namun belakangan ini sudah banyak pihak yang menyadari bahwa anggapan seperti itu kurang tepat bila dikaitkan dengan agama Islam yang begitu luhur dan murni.³⁹ Islam adalah satu-satunya agama yang tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) tetapi juga memiliki perangkat ajaran yang berhubungan dengan problematika kemanusiaan-keduniaan (horizontal)⁴⁰. Secara ilustratif dapat kita gambarkan, bahwa shalat diawali dengan ucapan takbir (simbol ketuhanan secara vertikal) namun diakhiri dengan ucapan salam kanan-kiri (simbol kemanusiaan secara horizontal).

Berdasarkan fakta historis di atas kita bisa menangkap pe-

ngertian tentang bagaimana sebenarnya konsepsi Islam tentang bela negara yang sudah tentu tidak sama dengan keberadaan agama lain (walaupun tidak mesti harus dipertentangkan). Hal tersebut agar dapat lebih dipahami bahwa Islam sangat apresiatif dengan bela negara sebagaimana dijelaskan secara luas terdahulu. Boleh jadi agama lain juga punya konsepsi tentang bela negara namun tidak sama seperti yang ada dalam ajaran agama Islam. Yang penting Islam tetap mengakui adanya pluralitas konsepsional dalam memahami antara aspek keagamaan dengan aspek kenegaraan.

Secara rasional, hubungan Islam dengan bela negara tidaklah lepas dari bentuk hubungan Islam dengan aspek kenegaraan itu sendiri. Sebagaimana dimaklumi, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sesuai dengan inti ajaran Islam itu sendiri. Namun bila dikaitkan dengan kenyataan kehidupan di dunia termasuk hubungannya dengan aspek kenegaraan, ketika itulah

³⁷ Lihat Martin Van Bruenessen, "Muslim Fundamentalism: Can it be Understood or Should it be Explained Away" 23-26 September 1992, *An International Seminar on Religions and Contemporary Development (in Comparative Perspective)*, Yogyakarta, Indonesia, juga I. B. Oka Puniatnaja, "Fundamentalisme dalam Agama-agama", *Ibid.* dan, P. Ary Roest Crollius, "Fundamentalism in Religions", *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Motto Arab: Bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah mati besok. Juga dikenal do'a umum: "Datangkanlah kebaikan kepada kami di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhilah diri kami dari siksaan api neraka" (*Robbana aatina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaaban naar*).

terjadi bentuk-bentuk interpretasi umat terhadap Islam. Interpretasi manusia terhadap agama tentu bersifat relatif, sedangkan agama adalah sesuatu yang mutlak, relativitas penafsiran (interpretasi) itu bersifat sah belaka, mengingat pola pemikiran, latar belakang kebudayaan serta kenyataan historis umat manusia cenderung berubah dari waktu ke waktu. Yang perlu disadari adalah bahwa Islam mengandung dua aspek ajaran, pertama, aspek ajaran yang bersifat universal, seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan (sebagaimana tercermin dalam falsafah negara kita Pancasila), serta nilai-nilai lainnya. Juga yang bersifat partikular, yakni berupa aplikasi dari nilai-nilai tersebut di atas yang tentunya sangat terikat dengan kondisi ruang dan waktu maupun pola pemikiran, kultur dari penganut itu sendiri. Ringkasnya, Islam ada yang universal (berlaku umum, mengatasi dimensi ruang dan waktu), ada yang partikular (terikat dengan ruang dan waktu). Sebagai contoh yang sederhana, umat Islam di mana saja dan kapan saja (secara universal) diwajibkan melaksanakan shalat. Tetapi (secara partikular), corak perlengkapan shalat seperti pakaian, tikar sha-

lat, bentuk masjid dan lain-lain sangat berbeda di masing-masing tempat dan zaman yang ada. Demikian pula dalam bentuk sistem kenegaraan, sistem politik pemerintahan, maupun kenegaraan lainnya bisa berbeda di masing-masing negara, yang penting (secara universal) dapat menerapkan nilai-nilai universal yang ada seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Yang penting, dalam Islam, apa pun bentuk partikularnya haruslah senantiasa dilandasi oleh aspek universal ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, negara muslim, (bukan Islam) mana pun (minoritas atau mayoritas) bisa saja mengadopsi sistem pemerintahan yang bagaimana pun bentuknya sepanjang dapat melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai universal yang dimaksud.⁴¹ Berikut ini penulis akan menguraikan sedikit tentang beberapa pandangan (mazhab) politik atau kenegaraan dalam Islam.

Mazhab Politik Kenegaraan dalam Islam

Secara filosofis (paling tidak) ada tiga mazhab kenegaraan yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Mazhab pertama berpendapat bahwa Islam itu seperti *super market (every thing)*,

⁴¹ Lihat Munawir Sadzali, *Ibid.*

serba ada, komplit. Menurut mazhab ini, untuk membangun sistem politik (kenegaraan) yang Islami haruslah murni dari Islam sendiri. Umat Islam tidak boleh melihat keluar. Mazhab pertama ini kita namakan dengan mazhab idealis. Kelompok mazhab ini dipelopori oleh mayoritas Ikhwanul Muslimin, Abul A'la al Maududi dan Muhammad Ras-yid Ridha.

Adapun mazhab politik yang kedua beranggapan bahwa Islam seperti agama-agama lain yang menyatakan bahwa soal-soal agama atau ritual keagamaan itu tergantung sepenuhnya terhadap Allah, sedangkan yang menyangkut tentang sistem politik sepenuhnya tergantung kepada kemauan rakyat. Seperti yang dinyatakan oleh Syaikh Ali Abdurraziq (Mesir), Nabi Muhammad SAW tampil dalam panggung sejarah hanya sebagai tokoh (pemimpin) ritual, tidak sebagai kepala negara (sebagaimana yang dianut mazhab pertama).

Mazhab kedua ini kita namakan dengan istilah mazhab realis-pragmatis. Para tokoh mazhab ini yang terkenal di antaranya (selain Ali Abdurraziq sendiri), juga adalah Thaha Husein (mantan Mendikbud Mesir). Secara faktual mazhab ini banyak dianut (walau secara terpaksa) di kebanyakan negeri-negeri mus-

lim.

Sedangkan mazhab politik (kenegaraan) yang ketiga berpendapat bahwa tidak benar dalam Islam ada sistem politik tertentu, tetapi tidak benar pula anggapan yang menyatakan bahwa "Islam sama sekali kosong politik". Mazhab ini berpendapat, di dalam Islam ada tata nilai etika politik yang bisa menjadi motivasi bagi bangunan sistem politik sebuah negara. Mazhab ketiga ini dianut oleh tokoh semacam DR. Husein Haikal, Prof. Dr. Fazlur Rahman serta tokoh-tokoh neomodernisme Islam lainnya. Tampaknya, tokoh-tokoh Islam dan cendekiawan muslim di Indonesia lebih tergolong kepada mazhab yang ketiga ini. Mazhab ini kita namakan dengan mazhab integralis.

Yang menjadi persoalan, dari ketiga mazhab politik (kenegaraan) di atas, mana yang dapat lebih diterima? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita rincikan, apakah yang dimaksud dengan sistem politik tersebut?

Sistem politik merupakan suatu konsepsi yang berisikan antara lain siapakah yang menjadi sumber kekuasaan kedaulatan negara? Tuhan, raja atau rakyat? Selanjutnya, siapakah yang menjadi pelaksana (penyelenggara) kekuasaan negara? Apakah dasar dan bagaimana

cara pemilihan yang diadakan? Terakhir, kepada siapakah kekuasaan dipertanggungjawabkan, dan bagaimana mekansime pertanggungjawaban tersebut.

Secara historis, dalam Al-Qur'an tidak didapati sistem dan tatacara pemilihan bagi terselenggaranya sebuah kekuasaan. Yang ada, hanya prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah. Dalam hadits nabi yang dimintakan pertanggungjawaban adalah rakyat yang dipimpin, bukan di depan rakyat (*An ro'iyatihi*, bukan *amaama ro'iyatihi*).

Mengenai sistem musyawarah, dalam sejarah Islam terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW senang sekali mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Jadi Nabi sendiri tidak membuat suatu pola tertentu dalam melaksanakan musyawarah tersebut (belum dikembangkannya sistem musyawarah secara institusional). Di dalam sistem demokrasi, kita kenal istilah menurut suara terbanyak. Namun, di zaman Nabi tidak selalu keputusan musyawarah diambil menurut suara terbanyak. Bahkan dalam beberapa hal, Nabi selalu mengambil keputusan yang kurang disetujui oleh sahabat. Tapi Nabi tetap menjalankan menurut *feeling* politik yang ada di dalam pikiran beliau.

Sebagai ilustrasi, setelah usai

perang Badar, ada 70 tawanan kafir yang tertangkap oleh umat Islam. Lalu Nabi minta pendapat dengan para sahabat. Abu Bakar berpendapat, agar ketujuh puluh tawanan tersebut dilepaskan dengan imbalan tebusan. Sementara Umar berpendapat, agar semua tawanan tersebut dibunuh saja. Akhirnya Nabi memutuskan tawanan tersebut dibebaskan dengan membayar tebusan. Begitu juga, kasus tentang jenazah Abdullah bin Ubay (munafik besar) yang dishalatkan Nabi, padahal mendapat protes dari pembesar sahabat terutama oleh Umar bin Khattab. Banyak kasus-kasus lain yang semisal.

Juga merupakan suatu realita, ketika Nabi wafat, ternyata tidak ada sistem kekuasaan yang ditinggalkan Nabi. Sehingga penguburan jenazah tertunda karena ingin menyelesaikan persoalan pengganti Nabi sebagai khalifah. Dan lebih jelas lagi kita lihat betapa saling berbedanya kasus pemilihan khalifah yang empat. Abu Bakar tampil sebagai khalifah setelah diba'iat secara langsung oleh Umar dan diikuti oleh orang banyak. Sedangkan Umar menjadi khalifah karena lebih dahulu direkayasa oleh Abu Bakar bersama dua sahabat terdekat yakni Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Usman sendiri terpilih menjadi

khalifah III lewat badan formatur yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka. Secara kebetulan keenam sahabat tersebut dari kelompok Quraisy, jadi tidak ada perwakilan lainnya. Pemilihan Ali bin Abi Thalib juga berbeda dengan Usman bin Affan.

Berdasarkan fakta di atas, pada prinsipnya, Islam tetap membenarkan sistem kekuasaan (pemerintahan) yang bagaimana bentuknya sepanjang dapat menerima atau tanpa meninggalkan nilai-nilai yang Islami seperti asas musyawarah, keadilan, persatuan dan lain-lain. Sedangkan mekanismenya bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi yang ada⁴².

Demikian sekedar gambaran tentang mazhab politik (kenegaraan) yang ada dalam sejarah Islam. Pemahaman terhadap hal tersebut di atas akan dapat lebih memudahkan pemahaman kita tentang hubungan Islam dengan bela negara itu sendiri.

Beberapa Kesimpulan dan Saran

Setelah dijelaskan beberapa aspek hubungan Islam dengan bela negara seperti tersebut di atas, kita dapat mengambil be-

berapa kesimpulan dan saran antara lain (1) agama Islam sebenarnya sangat apresiatif terhadap "Bela negara", "Kemiliteran" dan "Politik", hal tersebut dapat dibuktikan baik secara normatif maupun historis, (2) Adapun tentang kenyataan adanya pandangan dikotomis antara hubungan Islam dengan bela negara, kemiliteran dan politik dimaksud, tak lain adalah akibat masih minimnya pemahaman yang benar tentang hubungan dimaksud baik secara normatif lebih-lebih masih minimnya kesadaran historis yang berkenaan dengannya, (3) bela negara di sini mencakup mem-bela tanah air, mencintai tanah air, stabilitas negara, loyalitas terhadap bangsa dan negara serta istilah-istilah senada lainnya, (4) Islam memiliki konsepsi tentang bela negara, hubungan erat dengan kemiliteran dan politik, terutama yang bersifat universal, sedangkan penerapannya bersifat pertikular, dalam artian dapat disesuaikan dengan kondisi situasi dan zaman yang ada. Konsepsi tersebut haruslah diawali dengan pemahaman tentang mazhab kenegaraan (politik) yang pernah berkembang dalam sejarah Islam, (5) Meng-

⁴² Tentang trend politik (teori kenegaraan) Islam tersebut dapat dibaca karya-karya Abul A'la al Maududi, Husein Heikal, Thaha Husein, Ali Abdurraziq, Fazlur Rahman, Hasan Al Banna, Muhammad Rasyid Ridla, Ali Abdurraziq, dan lain-lain. Juga Munawir Sadzali, Ahmad Syafii Maarif, *Ibid*.

ingat umat Islam merupakan mayoritas di negeri ini, maka perlu adanya upaya sosialisasi secara kontinue dan terarah, agar pandangan dikotomis tentang Islam dan kenegaraan akan semakin dapat dihilangkan. Tentunya hal ini membutuhkan satu proses waktu dan kerja yang sangat panjang. (6) bila muncul kelompok sempalan yang cenderung anti pada negara, haruslah dilihat sebagai kelompok yang bukan mewakili Islam di negeri ini. Dampak perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun rendahnya pemahaman keagamaan maupun kenegaraan lebih dimungkinkan menjadi sumber munculnya gejala kaum sempalan tersebut. Dan memang sepanjang sejarah peradaban manusia, kelompok seperti itu tetap eksis, tinggal bagaimana kita berupa mengeliminirnya seminimal mungkin, (7) yang harus diingat adalah

bahwa umat Islam yang mayoritas di negeri ini tidak semata-mata dianggap sebagai obyek pembangunan tetapi lebih dari itu haruslah dianggap sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, aspirasi keagamaan sedapat mungkin diperluas dan dikaitkan dengan aspirasi kenegaraan secara komunikatif, persuasif dan edukatif. Dengan demikian partisipasi kaum muslimin akan banyak membantu jalannya tugas-tugas pembangunan di negeri ini tanpa berpretensi untuk menafikan partisipasi dari golongan lain, dan (8) Konsep ukhuwah Islamiyah haruslah diperluas menjadi persaudaraan secara universal (Islami) yang mengatasi batas-batas kesukuan, keagamaan, profesi dan sekat-sekat kultural lainnya. Dan hal tersebut tentunya sangat kondusif bagi upaya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita di masa depan.

